

ABSTRAK

Tarisa Rosilawati, 1218010225, 2025, “Analisis Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Pasca Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional”

Penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Namun, implementasi kebijakan ini di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penurunan motivasi kerja, serta ketidaksesuaian antara jabatan baru dengan kompetensi pegawai. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas kinerja pegawai dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung setelah diterapkannya kebijakan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tersebut berdasarkan teori kinerja dari Hersey, dkk. dalam Wibowo (2016) yang meliputi tujuh dimensi: tujuan, standar, umpan balik, alat/sarana, kompetensi, motif, dan peluang.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik sampling purposive sehingga terdiri dari 12 informan berdasarkan kategori dan klasifikasi tertentu. Lebih lanjut, penelitian merujuk pada 3 (tiga) sumber data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data dalam memperoleh dan menganalisis data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai setelah pengalihan jabatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung masih belum optimal. Beberapa kendala utama meliputi belum adanya kejelasan sistem kerja yang baru, kurangnya motivasi yang dimiliki Pegawai, rendahnya pemahaman pegawai terhadap peran jabatan fungsional, kurangnya dukungan dalam bentuk pelatihan dan fasilitas, serta regulasi yang terlalu cepat mengalami perubahan. Oleh karena itu, perlu adanya penataan ulang sistem kerja dan peningkatan kapasitas pegawai agar kebijakan penyederhanaan birokrasi dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Jabatan Fungsional, Kinerja Pegawai